

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena implementasi Kebijakan PATEN di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi melalui dukungan data-data kualitatif (hasil wawancara mendalam, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi), namun penggunaan data kuantitatif juga dimungkinkan sebagai pelengkap informasi yang digunakan dalam analisis setiap pertanyaan penelitian.

3.1. Metode Penelitian

Dalam penulisan tesis ini untuk mengumpulkan data dan informasi, penulis juga mempergunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Bogman dan Taylor yang dikutip Moleong (1993) didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dicermati. Sedangkan Simon (Suracmad, 1980) mengatakan bahwa “metode penelitian deskriptif digunakan untuk mendapatkan deskriptif *holistic* objek penelitian secara akurat”.

Biasanya dalam penelitian kualitatif lebih berorientasi teoritis, dimana teori dibatasi dengan pengertian bahwa suatu pernyataan sistematis yang berkaitan dengan seperangkat proposisi yang berasal dari data dan diuji kembali secara empiris.

Moleong (1995) berpendapat bahwa: penelitian deskriptif atau penelitian kualitatif digunakan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda;
2. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden;
3. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penanganan pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Studi Kasus (*case study*). Dalam penelitian ini, peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan kurun waktu yang ditentukan (Creswell, 2010). Atas dasar pemahaman tersebut, maka penelitian ini menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan yang diselenggarakan di kecamatan dalam implementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan berbagai perubahan yang terjadi ketika kebijakan tersebut diimplementasikan.

3.3. Peran Peneliti

Peran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis penafsir data, dan pelapor hasil, karena sesuai dengan yang dikatakan Creswell bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian interpretif, yang di dalamnya peneliti terlibat dalam pengalaman yang

berkelanjutan dan terus-menerus dengan para partisipan (Creswell, 2010). Selain itu, kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Medan Area yang mengamati implementasi kebijakan PATEN pada tempat penelitian ini dilakukan.

3.4. Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian ini dilakukan oleh Penulis yaitu bertempat pada Kecamatan Sidikalang, yang mana Kecamatan Sidikalang sebagai *pilot project* terselenggaranya PATEN diantara 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Dairi.

3.5. Teknik Pemilihan Informan

Informan dipilih dengan pertimbangan bahwa mereka merupakan orang-orang kunci (*key person*) dan sumber data atas fenomena yang diteliti. Pertimbangan yang digunakan atas pemilihan informan didasarkan kriteria *stakeholder* yang dirumuskan oleh Macjhrzak (1984), yaitu:

- a. Diidentifikasi sebagai *stakeholder* kunci;
- b. *Stakeholder* berperan sebagai pendukung atau oposan terhadap kebijakan;
- c. Kekuatan posisi dari *stakeholder* dipertimbangkan oleh pengambil keputusan;
- d. Adanya kemungkinan dukungan dari pengambil keputusan dalam implementasi rekomendasi diberi kuasa dan pendapat dari *stakeholder*.

Berdasarkan kriteria tersebut diatas, maka informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai *Stakeholder* kunci adalah : Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Dairi;
2. Sebagai Pihak pendukung implementasi kebijakan adalah : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Dairi dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dairi;
3. Berdasarkan posisi yang dipertimbangkan oleh pengambil keputusan, maka selaku satuan kerja teknis yang membidangi : Camat Kecamatan Sidikalang dan Sekcam Kecamatan Sidikalang;
4. *Stakeholder* yang berperan sebagai pendukung kebijakan tersebut adalah : Staf pada Kantor Kecamatan Sidikalang yang menangani PATEN beserta beberapa perwakilan masyarakat yang menerima pelayanan PATEN di Kantor Kecamatan Sidikalang.

TABEL 3.1
INFORMAN/NARASUMBER

No	Informan/Narasumber	Jumlah
1	Asisten Administrasi Umum Setda kab. Dairi	1 Orang
2	Kabag TAPEM Setda Kab. Dairi	1 orang
3	Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	1 Orang

4	Camat Sidikalang	1 Orang
5	Sekcam Sidikalang	1 Orang
6	Staf Kantor Camat yang menangani PATEN	9 Orang
7	Perwakilan Masyarakat yang mendapat pelayanan PATEN	5 Orang

Sumber: Responden Peneliti di Lapangan, 2017

3.6. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Menurut Creswell, teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif terdiri atas empat strategi pengumpulan data, yaitu observasi kualitatif, wawancara kualitatif, dokumen-dokumen kualitatif, dan materi audio dan visual (2010).

Sejalan dengan itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi dan Studi Lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian dan melakukan pencatatan terkait informasi yang relevan dengan penelitian;
2. Wawancara. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer baik dari *key informan*, maupun informan lain yang perannya juga relevan dalam mendukung penelitian. Dalam Wawancara ini pihak yang dimintai keterangan yaitu:
 - a. Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Dairi

- b. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Dairi
- c. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Dairi
- d. Camat Sidikalang dan Sekeretaris Kecamatan Sidikalang
- e. Para Kepala Seksi, Para Kasubbag dan Staf yang berada di Kantor Camat Sidikalang.

3. Studi Kepustakaan dan dokumen kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan terutama mencari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan PATEN, misalnya informasi dari peraturan dan petunjuk pelaksanaan PATEN, laporan kantor, data-data dinding yang dianggap relevan, serta sumber-sumber lain yang mendukung penelitian;

4. Audio dan Visual. Data berbentuk materi audio dan visual ditujukan untuk menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, atau paling tidak dapat digunakan data pendukung penelitian. Audio dan Visual dalam penelitian ini berupa rekaman hasil wawancara dan dokumentasi pelaksanaan pelayanan PATEN khususnya di Kecamatan Sidikalang yang telah dilakukan setelah penelitian.

3.7. Defenisi Konsep dan Definisi Operasional

3.7.1. Defenisi Konsep

a. Implementasi Kebijakan:

Menurut Edward III, Implementasi Kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentuk kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan

bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak cepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan (Budi Winarno, 2002).

Dalam mengkaji implementasi kebijakan, Edwards mulai dengan mengajukan dua buah pertanyaan, yakni: Prakondisi-prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan berhasil? Dan hambatan-hambatan utama apa yang mengakibatkan suatu implementasi gagal? Edwards berusaha menjawab dua buah pertanyaan penting ini dengan membicarakan 4 (empat) faktor atau variabel-variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor atau variabel-variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, struktur organisasi dan disposisi.

Menurut Edward III, oleh karena 4 (empat) faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan, maka pendekatan yang ideal adalah dengan cara merefleksikan kompleksitas ini dengan membahas semua faktor tersebut sekaligus. Untuk memahami suatu implementasi kebijakan perlu menyederhanakan, dan untuk menyederhanakan perlu merincipenjelasan-penjelasan tentang implementasi dalam komponen-komponen utama. Patut diperhatikan disini bahwa implementasi dari setiap kebijakan

merupakan suatu proses yang dinamis yang mencakup banyak interaksi dari banyak variabel. Oleh karenanya, tidak ada variabel tunggal dalam proses implementasi, sehingga perlu dijelaskan keterkaitan antara satu variabel dengan variabel yang lain dan bagaimana variabel-variabel ini mempengaruhi proses implementasi kebijakan.

b. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Salah satu upaya perbaikan pelayanan publik di kecamatan dilakukan melalui penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN). Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan yang proses pengelolaannya, dilakukan melalui satu meja atau loket pelayanan.

PATEN diselenggarakan dengan maksud untuk mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/dinas pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di Kabupaten/Kota bagi kecamatan yang secara kondisi geografis daerah akan lebih efektif dan efisien dilayani melalui kecamatan. Pusat pelayanan masyarakat berarti dimasa datang, kecamatan harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara proposional berdasarkan kriteria dan skala kecamatan dibidang perizinan dan non perizinan.

Untuk mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan tersebut, maka syarat yang harus dipenuhi adalah adanya pelimpahan sebagian wewenang

perizinan dan non perizinan sesuai skala dan kriteria dari Bupati/Walikota kepada camat.

Sementara yang menjadi tujuan diselenggarakannya PATEN adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat berarti masyarakat dapat menerima pelayanan publik yang lebih dekat baik secara jarak maupun waktu.

3.7.2. Defenisi Operasional

Dalam implementasi program PATEN tersebut sesuai dengan model George Edward III menjelaskan bahwa tidak ada satu variabel (Komunikasi, Sumber Daya, Struktur Birokrasi dan Disposisi) yang dapat berdiri sendiri atau tidak ada variabel tunggal. Dimana setiap variabel saling mempengaruhi dalam menentukan berhasil atau tidaknya proses implementasi. Seperti sebuah sistem yang terdiri dari unit-unit sistem, variabel yang mendominasi atau timpang sama sekali akan memberikan dampak yang bersifat menyeluruh pada keseluruhan implementasi.

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Suatu komunikasi yang tersalurkan dengan baik secara langsung akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Hal ini ditandai dengan setiap implementor harus memahami apa yang harus mereka kerjakan, kegiatan apa yang harus dilaksanakan, dan bagaimana melaksanakannya serta apa tujuan dan sasaran program tersebut.

Dalam hal ini, komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Dairi khususnya Kecamatan Sidikalang dalam hal mengkomunikasikan program PATEN tersebut ialah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi terkait tentang PATEN. Sosialisasi dilakukan dimulai dari:
 - a. pihak Kabupaten: menerbitkan Keputusan Bupati mengenai Penetapan Kecamatan sebagai Penyelenggara PATEN, Pembagian Tupoksi tentang Tim Teknis penunjukan tim teknis pelaksana PATEN,
 - b. Sampai kepada pihak Kecamatan menerbitkan: Keputusan Camat Sidikalang tentang Penyelenggara PATEN di Kecamatan Sidikalang.
2. Melakukan Launching PATEN dengan dihadiri oleh Kepala Daerah (Wakil Bupati Dairi), Muspida Kabupaten Dairi dan Muspika Kecamatan Sidikalang, Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Seluruh Perangkat Kecamatan,, Seluruh Perangkat Kelurahan/Desa, masyarakat dan pihak terkait lainnya. Sebelum Launching PATEN dilaksanakan, sebelumnya pemberitahuan telah dilakukan terkait PATEN tersebut yaitu dengan merujuk Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Bupati Dairi perihal Launching Perdana PATEN yang bertempat di Kecamatan Sidikalang selain juga telah menghayo-hayokan melalui radio.

3. Sosialisasi lainnya dilakukan dengan menyebarkan brosur oleh Pihak Kabupaten dibantu Pihak Kecamatan di Kantor-kantor Pemerintahan yang ada Di kabupaten Dairi,
4. Selain itu juga pembuatan spanduk terkait PATEN, baik leaflet, stiker dan sebagainya.

b. Sumber Daya

Berbicara Sumber Daya dalam hal penyelenggaraan PATEN merupakan aspek yang sangat penting., dimana diperlukan penguatan baik dari segi kuantitas dan kualitas.

Sumber Daya tersebut terdiri dari:

1. Sumber Daya Manusia: dalam hal ini yang dilihat dari jumlah personil PATEN yang ada di Kecamatan Sidikalang sangatlah kurang. Dimana perlu penambahan personil pada kecamatan yang benar-benar menguasai PATEN tersebut agar pelayanan yang diberikan bisa mendapat hasil yang maksimal. Dikarenakan petugas PATEN yang bekerja didalamnya pun merangkap pekerjaannya dalam memberikan pelayanan. Guna mengatasi kekurangan dari segi jumlah maka dimungkinkan penambahan personil PATEN yang dilakukan oleh Kecamatan Sidikalang yaitu dengan pengusulan penambahan pegawai pada Kantor Kecamatan Sidikalang kepada Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) selain itu penambahan tenaga

honorar yang dalam penggajiannya ditampung pada APBD Kecamatan Sidikalang.

2. Dilihat dari Sarana dan Prasarana Pendukung penyelenggaraan PATEN. Dalam hal ini penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung PATEN disediakan dan diperlengkapi langsung oleh pihak Kabupaten yang ditampung pada APBD Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi.
3. Dalam hal Sumber Dana juga demikian. Ditampung pada APBD Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi mengenai masalah pembayaran honorarium para petugas Teknis yang diunjuk sesuai Keputusan Bupati, sedangkan untuk petugas loket PATEN yang ada di Kecamatan tidak mendapat penambahan dana apapun karena minimnya dana yang tersedia. Intinya menggunakan dana secukupnya yang ditampung dalam APBD Kecamatan Sidikalang.

c. Struktur Birokrasi

Berbicara struktur birokrasi dalam penyelenggaraan PATEN melibatkan para pelaksana kebijakan (*implementor*) sehingga sasaran dan tujuan kebijakan program tersebut dapat terlaksana dengan baik. Berbicara struktur birokrasi juga dapat kita lihat, dimulai dengan adanya Standar Pelayanan PATEN yang diterapkan berdasarkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 26 Tahun 2014 terutama di Pelayanan Bidang Perzinan dan Non Perzinan. Standar Pelayanan ini berisi tentang jenis-jenis pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan yaitu berupa:

- a. Persyaratan untuk mendapatkan pelayanan;
- b. Proses/prosedur pelayanan;
- c. Pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelayanan;
- d. Waktu pelayanan, dan;
- e. Biaya pelayanan.

d. Disposisi

Disposisi atau sikap dari para pelaksana dalam menentukan suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Dalam Disposisi atau sikap mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit diterapkan.

Dalam hal menerapkan PATEN tersebut diawali dengan:

- a. Komitmen yang dimiliki oleh seorang Kepala Daerah (Bupati) dalam mendelegasikan sebagian kewenangan kepada Camat khususnya pada Bidang Perizinan dan Bidang Non Perzinan;
- b. Selain itu, diperlukan menjalin hubungan atau melakukan koordinasi langsung antar pihak Kabupaten dengan pihak Kecamatan. Dalam hal ini, pihak Kabupaten yaitu seperti misalnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perzinan Terpadu Satu Pintu (DPM&PTSP). Yang mana

kewenangan yang didelegasikan tersebut semula yang menangani adalah pihak DPM&PTSP yang kemudian dipindahkan ke Kecamatan maka dari itu diperlukan koordinasi yang terjalin dengan baik antara pihak Kabupaten dan pihak Kecamatan (yang ditunjuk sebagai penyelenggara PATEN).

- c. Sementara untuk pihak Kecamatan menyambut baik dan mendapat dukungan dalam hal pelaksanaan PATEN tersebut dengan turut melakukan rapat-rapat terkait dengan persiapan PATEN dan sampai dengan terselenggaranya PATEN tersebut baik kepada pihak Kelurahan, pihak Desa dan ataupun masyarakat.

3.8. Analisa Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan teknik *interactive model*, yang digunakan untuk mengolah data yang diperoleh di lapangan, sehingga mencapai suatu kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini. Aktivitas dalam analisis data kualitatif ini akan dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Selanjutnya, proses analisis data akan dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan, dan dokumentasi yang telah dilakukan. Data tersebut kemudian dianalisis melalui tiga komponen yang meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*) (Prastowo, 2011).